



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. KUPANG



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



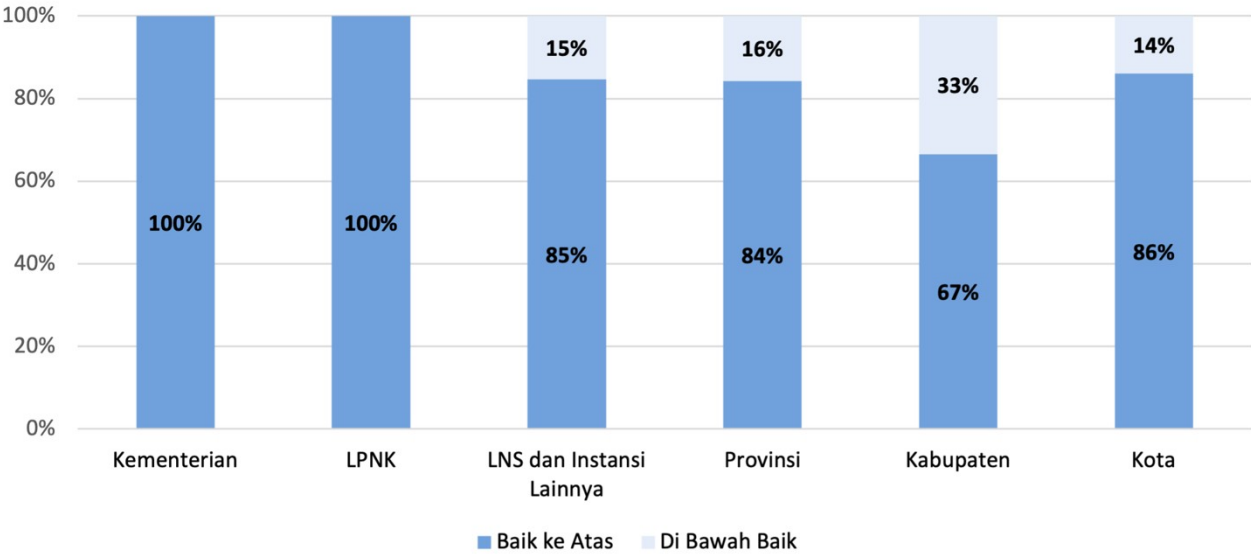
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

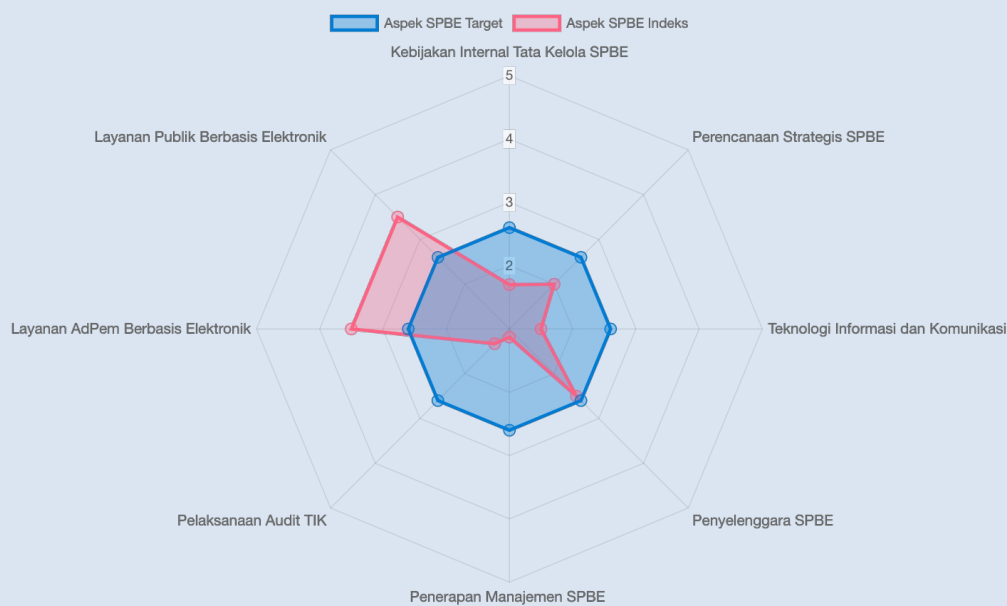
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,48
Domain Kebijakan SPBE	1,70
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1,70
Domain Tata Kelola SPBE	1,90
Perencanaan Strategis SPBE	2,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,50
Penyelenggara SPBE	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,18
Penerapan Manajemen SPBE	1,13
Audit TIK	1,33
Domain Layanan SPBE	3,50
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,50
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,50

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Terdapat 3 indikator pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE di Kabupaten Kupang telah memenuhi kriteria pada Level 3 yakni Kebijakan internal Manajemen data, Pembangunan Aplikasi dan Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan
Belum ada indikator yang merupakan kekuatan pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE di Kabupaten Kupang.
- Kelemahan
Indikator yang lemah pada Kebijakan internal Tata Kelola SPBE di Kabupaten Kupang adalah Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, dan Kebijakan Internal Audit TIK.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Belum ada Indikator yang memenuhi kriteria pada aspek perencanaan strategis SPBE di Kabupaten Kupang.

- Kekuatan
Tidak ada indikator yang merupakan kekuatan pada aspek perencanaan strategis SPBE di Kabupaten Kupang.
- Kelemahan
Semua indikator berupa Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Keterpaduan Rencana dan Anggaran dan Indikator Inovasi Proses Bisnis merupakan kelemahan pada aspek perencanaan strategis SPBE di Kabupaten Kupang.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hanya indikator Layanan Jaringan Intra yang telah memenuhi kriteria pada aspek TIK SPBE di Kabupaten Kupang.

- Kekuatan
Belum ada Indikator yang menjadi kekuatan pada aspek TIK SPBE di Kabupaten Kupang.
- Kelemahan
Indikator yang lemah pada aspek TIK di Kabupaten Kupang adalah Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data dan Penggunaan SPL (Level 1).

D. Penyelenggara SPBE

Indikator Kolaborasi Penerapan SPBE telah memenuhi kriteria pada aspek Penyelenggara SPBE di Kabupaten Kupang.

- Kekuatan
Tidak terdapat indikator yang menjadi kekuatan pada aspek Penyelenggara SPBE di Kabupaten Kupang.
- Kelemahan
Indikator Tim Koordinasi SPBE yang berada pada kematangan Level 2 merupakan kelemahan pada aspek Penyelenggara SPBE di Kabupaten Kupang.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Belum ada indikator yang memenuhi kriteria pada aspek Penerapan Manajemen SPBE di Kabupaten Kupang.

- Kekuatan
Tidak ada indikator yang merupakan kekuatan pada aspek Penerapan Manajemen SPBE di Kabupaten Kupang
- Kelemahan
Semua indikator masih lemah pada aspek Penerapan Manajemen SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Kupang. (berada pada tingkat kematangan Level 1)

F. Pelaksanaan Audit TIK

Semua indikator belum memenuhi kriteria pada aspek Audit TIK di Kabupaten Kupang.

- Kekuatan
Tidak ada indikator yang merupakan kekuatan pada aspek Audit TIK di Kabupaten Kupang

- Kelemahan
Semua indikator masih lemah pada aspek Audit TIK di Kabupaten Kupang dimana Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan Informasi pada Level 1 dan pelaksanaan Audit Aplikasi dengan tingkat kematangan Level 2.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Hampir semua indikator telah memenuhi kriteria pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kupang yakni Level 4 pada Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah dan Layanan Kinerja Pegawai, dan pada Level 3 dalam Layanan Pengelolaan BMN/D Daerah dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

- Kekuatan
Kekuatan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kupang terdapat pada Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah dan Layanan Kinerja Pegawai (Level 4)
- Kelemahan
Terdapat satu indikator pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kupang yang lemah (Level 1) yakni Layanan Arsip Dinamis yang baru pada tahap inisiasi.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Semua indikator telah memenuhi kriteria pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Kabupaten Kupang yakni Layanan Publik Sektor 1 (OSS), dan Layanan Publik Sektor 3 dengan ALEKOT V.2) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Layanan Publik Sektor 2 (Layanan EARSIP DUKCAPIL dengan kematangan pada Level 4.

- Kekuatan
Kekuatan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Kabupaten Kupang terdapat pada Layanan Publik Sektor 1 (OSS), dan Layanan Publik Sektor 3 dengan ALEKOT Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Layanan Publik Sektor 2 (E-ARSIP DUKCPIL) dengan kematangan pada Level 4.
- Kelemahan
Indikator yang lemah pada aspek Layanan Publik berbasis Elektronik di Kabupaten Kupang adalah pada tingkat kematangan Level 2 Layanan Data Terbuka.

REKOMENDASI

Kabupaten Kupang memiliki nilai indeks SPBE tahun 2024 sebesar 2,483 dengan Kriteria CUKUP. Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kupang, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan beberapa implementasi yang merupakan rekomendasi evaluasi SPBE tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mereviu dan mengevaluasi beberapa regulaasi penyelenggaraan SPBE di Kab. Kupang dan mengintegrasikannya menjadi suatu regulasi terkait Penyelenggaraan SPBE dengan memperhatikan seluruh muatan SPBE yang terdapat pada Perpres No. 95 tahun 2018 berdasarkan kondisi internal yang ada di Kab. Kupang.
2. Melengkapi semua domain Arsitektur SPBE dan muatan Peta Rentana sesuai Perpres 95 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPBE dan menginput Domain Arsitektur Kabupaten Kupang di SIA SPBE Nasional, mematangkan keterpaduan Rencana dan Anggaran dan membuat inovasi Proses Bisnis di Kab. Kupang.
3. Menyusun Pedoman dan SOP pada aspek TIK Mendokumentasikan aktivitas pada semua proses pembangunan aplikasi Penguatan Layanan Pusat data dan Sistem Penghubung Layanan di Kab. Kupang Mereviu Layanan Jaringan Intra.Pemkab Kupang.
4. Mewujudkan rencana kegiatan Tim Koordinasi berdasarkan tugas yang telah ditetapkan Mendokumentasikan semua kegiatan SPBE dengan sistem kearsipan yang baik membentuk tim khusus untuk Kolaborasi SPBE di Kab. Kupang.
5. Penerapan Manajemen SPBE membutuhkan upaya khusus dalam hal implementasi Peta Rencana yang telah dilengkapi. Menyusun bukti implementasi Penerapan Manajemen yang telah implementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang.
6. Menyusun perencanaan kegiatan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pedoman Audit TIK) sesuai Peta Rencana SPBE Kab. Kupang dengan membentuk Tim Audit internal dan melibatkan Auditor tersertifikasi.
7. Memanfaatkan aplikasi berbagi pakai nasional kearsipan SRIKANDI yang telah diinisiasi Menguatkan dan mengevaluasi secara berkala pemanfaatan aplikasi berbagi pakai Nasional yang telah dimanfaatkan untuk Pemkab. Kupang.
8. Memanfaatkan aplikasi berbagi pakai Nasional yang dimanfaatkan untuk menunjang Layanan Data Terbuka untuk Pemkab. Kupang, seperti SATU-DATA atau WALI DATA.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	1
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024